

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, suatu metode sangat diperlukan karena bertujuan untuk memperoleh pemecahan masalah dari suatu masalah yang sedang diteliti agar mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan sifat data dalam penelitian ini maka digunakan metode deskriptif. Terkait dalam penelitian ini, maka penelitian deskriptif ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam kemudian dilakukan analisis dan menggambarkan implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi terkait kebijakan sekolah inklusi di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Selanjutnya Menurut Nasir (2009: 54) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antar satu faktor dengan faktor yang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa substansi dalam penelitian ini tidak dirancang untuk menguji sebuah hipotesis, akan tetapi hanya mendeskripsikan kecenderungan fenomena-fenomena simbolik dan dapat merefleksikan dengan apa adanya, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengedepankan teknik studi deskriptif. Perilaku dan praktik sosial budaya dalam segala bentuk interaksi, komunikasi, aturan, moralitas, sistem keyakinan dideskripsikan sebagaimana adanya dalam kehidupan keseharian, karena penelitian

ini bukanlah penelitian yang melakukan intervensi terhadap subjek penelitian. Proses penelitian bersifat fleksibel dan kontekstual berkembang sebagai respon terhadap realitas hidup yang ditemui dilapangan, menekankan pada makna bagaimana masyarakat *make sense* kehidupannya, pengalaman, dan struktur dunianya sendiri (Creswell, 2012: 145).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena dengan pendekatan kualitatif penelitian berusaha menjelaskan, menganalisis fakta di lapangan secara alamiah dan berusaha menemukan teori-teori dasar yang bersifat deskriptif. Teknik penelitian melalui pengungkapan banyak cerita yang bersifat ide natural namun penting, yang diceritakan oleh orang-orang yang ada dilapangan, tentang peristiwa-peristiwa nyata dengan cara-cara yang alamiah. Karena itu akan diusahakan keterlibatan peneliti, namun tanpa intervensi terhadap variabel-variabel proses yang sedang berlangsung apa adanya, Maka penelitian ini disebut penelitian naturalistik, karena situasi lapangan Penelitian bersifat “natural” atau wajar, sebagaimana adanya tanpa manipulasi yang diatur dengan eksperimen atau test. Bogdan dan Taylor (1993: 30) mengemukakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif akan menunjuk kepada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi. Menurut Nasution (2003: 5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif pada haikatnya mengamati perilaku keseharian orang dalam lingkungan hidupnya. Dengan ciri-ciri lebih lanjut adalah : (1) *Naturalistic Inquiry*; (2) *Inductive Analysis*; (3) *Holistic Perspective*; (4) *Qualitative Data*; (5) *Personal contact and insight*; (6) *Dynamic system*; (7) *Unique case orientation*; (8) *Context sensitivity*; (9) *Emphatic neutrality*; (10) *Design flexibility*. Dengan penelitian ini maka apa yang terlaksana dilapangan, dianalisis dan dievaluasi berdasarkan suatu kriteria tertentu sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini masalah penelitian merupakan fokus penelitian yaitu efektivitas implementasi kebijakan

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi ditinjau dari kebijakan pendidikan inklusif”.

Dari pendapat di atas nampak bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan kecermatan dalam pelaksanaannya, hal ini tidak lain karena setting alamiah perlu tetap terjaga agar data yang diperoleh dapat benar-benar menunjukkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Selain itu analisis dilakukan bersifat induktif dari hal-hal khusus berdasarkan fakta lapangan untuk kemudian dipahami dan ditafsirkan dalam konteks keseluruhan kejadian yang bersifat holistik, serta data yang dikumpulkan merupakan data yang berkategori kualitatif, disamping itu penelitian kualitatif juga menunjukkan suatu penelitian yang menunjukkan penggunaan manusia sebagai alat dalam pengumpulan data dengan titik berat kepada proses ketimbang hasil dari suatu fenomena lapangan dan karena apa yang terjadi di lapangan banyak yang sulit atau tidak mungkin diperkirakan sebelumnya maka desain penelitian ini bersifat fleksibel dalam arti memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Dalam pelaksanaan penelitian dilakukan dalam tiga tahap yang secara ringkas akan dijelaskan oleh peneliti yaitu : Tahap I dalam penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan untuk menggambarkan profil dari kondisi obyektif dari implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar berdasarkan analisis ditinjau melalui indeks inklusi, dengan cara mengeksplorasi terhadap subyek yaitu kepala bagian pendidikan dasar, kepala pusat sumber, kepala sekolah,, guru pendamping khusus serta orangtua. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman observasi dengan teknik observasi tertutup dengan mengamati aktivitas-aktivitas yang ada guna mendapatkan data-data empirik temuan dilapangan. Tahap II dalam penelitian ini yaitu menyusun rumusan awal model implementasi pendidikan inklusif sebagai fokus dalam penelitian ini dimana produknya berupa draft naskah akademik yang meliputi proses kebijakan pendidikan inklusif, pemahaman tentang pendidikan inklusif, mekanisme atau proses pelaksanaan pendidikan inklusif, kebijakan pendidikan yang diberlakukan di sekolah,

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

praktik pada proses pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif meliputi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi), serta faktor pendukung dan penghambat realisasi dari pendidikan inklusif. Tahap III dalam penelitian ini mengetahui kiprah pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam mendorong implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui kebijakan yang akan diberlakukan. Dalam hal ini adalah kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil *ekspert judgement* tentang model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, hal tersebut dilakukan guna mengukur kemajuan pelaksanaan program pemerataan sekolah inklusi dalam implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilakukan sekolah dasar sumber dukungan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif sehingga dapat memberikan kebutuhan layanan pendidikan.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rancangan tentang tata cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu (Nasution, 2003: 23). Untuk mengaplikasikan metode ilmiah dalam praktik penelitian, maka diperlukan desain penelitian yang sesuai dengan realitas penelitian, kondisional, dan seimbang dengan penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian secara kmprehensif mengandung makna yang sama dengan rancangan penelitian yang menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, kaidah penelitian, waktu penelitian, sumber data dan kondisi seperti apa data dikumpulkan dan dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan kemudian diolah. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai kejadian yang telah terjadi dari. Dengan mengedepankan pada konsep-konsep yang ada pada teori yang diperoleh dari studi litelatur maka dilakukan identifikasi mengenai kondisi obyektif atau faktual prihal implementasi kebijakan pendidikan inklusif, memaparkan tahap-tahap manajemen penyusunan program yang dilakukan pokja inklusi, dan menyusun rumusan model hipotetik implementasi pendidikan

ROBIANSYAH. STU, 2017

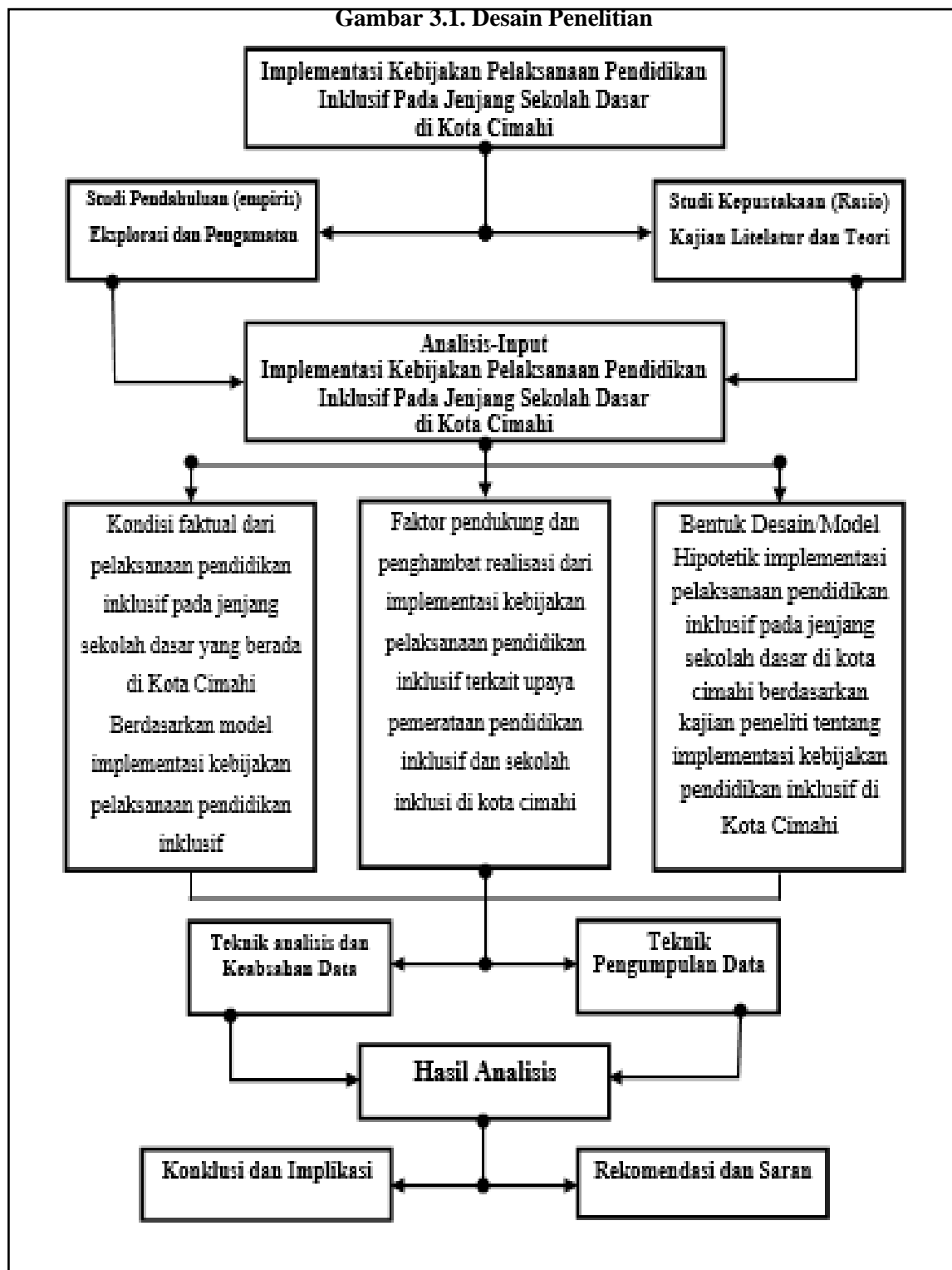
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

inklusif di jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi. Untuk selanjutnya desain penelitian tersebut digambarkan pada bagan dibawah ini:

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu



ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

C. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif bersifat terbuka terhadap perbedaan karakter peserta didik dan berupaya mengakomodasi setiap perbedaan tersebut dengan cara-cara yang tidak merugikan peserta didik lain. Bahkan, dalam pendidikan inklusif diharapkan perbedaan karakteristik dan kebutuhan peserta didik menjadi pembelajaran tersendiri yang bernilai serta mengandung manfaat bagi setiap peserta didik. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya menurut Prastiyono (2013: 119), pada konteks pendidikan luar biasa di Indonesia, pendidikan inklusi bukanlah satu-satunya cara mendidik *disabled children* dengan maksud untuk mengantikan pendidikan segregasi. Melainkan, suatu alternatif, pilihan, inovasi, atau terobosan/pendekatan baru disamping pendidikan segregasi yang sudah berjalan lebih dari satu abad. Hal ini dikarenakan setting pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di Indonesia menganut pendekatan “*Multi-track Approach*”. Salah satu penyebab masih terbatasnya jumlah sekolah dalam setting pendidikan inklusif dan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah reguler. Selain itu pada umumnya lokasi sekolah luar biasa (SLB) berada di ibu kota kabupaten atau kota, padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di beberapa daerah *BufferState* (kecamatan atau desa), tidak hanya di ibu kota kabupaten saja. Akibatnya sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara kalau akan disekolahkan di sekolah terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di sekolah

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah.

Berdasarkan permasalahan itu. Maka, sangat diperlukan kebijakan pendidikan inklusif, yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Menurut Prastiyono (2013: 121) dengan dikeluarkannya peraturan tersebut di atas, tentang pendidikan inklusif bertujuan: (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bernilai dan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik, sangat diperlukan implementasi kebijakan inklusif, oleh karena itu sangat dibutuhkan para implementor yang mempunyai komitmen tinggi, mau dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain: (a) kebijakan hukum dan perundang-undangan, (b) sikap, pengalaman dan pengetahuan, (c) tujuan pendidikan nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan, (d) perubahan paradigma pendidikan seperti: desain pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar, (e) adaptasi lingkungan, dan (f) kerja sama kemitraan yang meliputi: pemerintah, sekolah, orang tua dan masyarakat.

2. Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

peserta didik lain seuseranya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa (Florian, 2008). Atas dasar pengertian dan dasar pendidikan inklusi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang berusaha mengakomodasi segala jenis perbedaan dari peserta didik. Kehadiran pendidikan inklusi di Indonesia bukan tanpa sebab, karena kondisi realitas dilapangan mengharuskan pendidikan inklusi masuk sebagai salah satu model pendidikan yang inovatif tanpa diskriminasi, untuk menunjang keberadaan pendidikan inklusif pemerintah Indonesia membuat peraturan tau kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan pendidikan inklusif

Kita sudah mahfum dan mensyukuri bahwa sejak digulirkannya pendidikan inklusif di Indonesia, sambutan dan apresiasi masyarakat sangat luar biasa, sehingga implementasinya tumbuh dan berkembang cepat diberbagai pelosok negeri. Pendidikan inklusif juga akan terus berubah secara pelan-pelan sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam prakteknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam mengahapi tantangan pendidikan dan hak azasi manusia. Meskipun definsi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, namun tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung didalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa (*special education*), konsep yang mendasari pendidikan inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus (*special education*). Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan khusus (Sunanto *et all.* 2004: 2). Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (*education for all*) dan konsep tentang perbaikan sekolah (*schools*

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

improvement), pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis merubah sikap skeptis, apriori dan labeling masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Adalah suatu cara atau tindakan dalam bentuk fisik maupun psikis yang mendukung implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif.

4. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Adalah suatu cara atau tindakan dalam bentuk fisik maupun psikis yang menghambat implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif.

D. Lokasi, Subyek dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Cimahi yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Pokja Inklusi, Sekolah dukungan pusat sumber inklusi dan sekolah dasar sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi. Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, maka penelitian dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap subjek yang diteliti, karena dalam suatu penelitian subjek merupakan langkah yang sangat menunjang untuk mendapatkan data yang diperlukan, dan dalam usaha mengumpulkan data dari kegiatan penelitian ini terlebih dahulu peneliti menentukan subyek penelitian sebagai yang dijadikan sumber data. Teknik sampling yang dipilih dalam proses penelitian ini adalah *purposive sampling* dikarenakan sifat dari penelitian ini yaitu kualitatif, hal tersebut dikarenakan pertanyaan penelitian

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

kualitatif tidak terfokus pada berapa banyak atau berapa sering, tapi menemukan jawaban dalam masalah. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang bersedia memberikan informasi-informasi yang berisi keterangan dan data penting yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: Kepala Bagian Pendidikan Dasar, Ketua Pokja Inklusi, Ketua Pusat Sumber Inklusi, kepala sekolah dan guru di sekolah penyelenggara inklusi yang telah direkomendasikan baik yang belum dan yang telah memperoleh pemahaman tentang pendidikan inklusif atau telah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif serta telah menjalankan proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Penetapan pemilihan subjek penelitian tersebut atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Sekolah dasar tempat aktivitas subjek adalah sekolah dasar inklusi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh dinas pendidikan kota cimahi sebagai sekolah dasar sumber dukungan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di kota cimahi.
2. Model implementasi kebijakan pendidikan inklusif belum berjalan dengan optimal sebagaimana diamanahkan dalam peraturan daerah, serta dihadapkan pada situasi permasalahan-permasalahan yang bersifat kompleks.
3. Perlunya komunikasi dan sosialisasi yang baik antar aktor pelaksana/implementor terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar inklusi di kota cimahi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selain itu, dalam suatu penelitian suatu teknik pengumpulan data sangat

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

diperlukan untuk menjawab hipotesa yang di gunakan secara objektif. Menurut Rahardjo (2011), mengemukakan bahwa pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan secara faktual ditempat penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat sistematis serta bertujuan untuk melihat fenomena-fenomena yang nampak berkaitan dengan implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif yang dikelola oleh pokja inklusi serta sekolah pusat sumber inklusi dan pelaksanaannya dilakukan oleh sekolah dasar inklusi. Adapun pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi non partisipatoris digunakan untuk melihat secara langsung dengan mengamati aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian seperti dinas pendidikan Kota Cimahi yang terdiri dari kepala bagian pendidikan dasar dan ketua pokja inklusi lalu di pusat sumber inklusi Kota Cimahi, sekolah inklusi yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru pendamping khusus, dan peserta didik. kemudian memilih apa yang diamati dan terlibat secara aktif di dalamnya. Melalui pengamatan dilapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya informasi, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (*open-ended interview*) yang secara mendalam langsung

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

terhadap informan yang mengetahui secara jelas dan mendetail tentang pengelolaan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi, agar peneliti mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya sesuai yang ada, dialami dan dirasakan yang dilakukan kepada orang-orang yang ada dalam ruang lingkup penelitian. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar tidak keluar dari fokus yang telah ditentukan, dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan merupakan proses memperoleh keterangan, informasi atau data secara langsung yang diperlukan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara terbuka melalui komunikasi tatap muka langsung antara penanya atau yang mewawancarai dengan penjawab atau yang diwawancarai. Dalam konteks wawancara ini ditunjukkan kepada praktisi pendidikan dari unsur dinas pendidikan kemudian dilakukan kroscek terhadap beberapa kepala sekolah yang direkomendasikan/ditunjuk oleh pokja inklusi melalui dinas pendidikan kota cimahi. Beberapa sasaran wawancara dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- 1) Wawancara kepada kepala sub bagian pendidikan dasar atau yang mewakili dalam hal ini praktisi dinas pendidikan yang telah memahami konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota cimahi tentang kondisi faktual dan obyektif dari pokja inklusi dan pelaksanaan pendidikan inklusif di kota cimahi, Dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data tentang kondisi obyektif dan faktual dari implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di kota cimahi berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, menelaah dan menyimpulkan faktor-faktor pendukung dan penghambat realisasi kegiatan, langkah-langkah yang dirumuskan terkait formulasi dan implementasi strategi yang diterapkan sebagai acuan penyusunan rumusan model hipotetik

ROBIANSYAH. STU, 2017

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH
DASAR DI KOTA CIMAH**

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

implementasi kebijakan pendidikan inklusif; serta memperoleh informasi terkait penentuan kebijakan strategis yang sebaiknya diterapkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan dan dasar tata cara pelaksanaan program kerja guna realisasi upaya pemerataan pendidikan inklusif dan sekolah inklusi yang ada di kota cimahi.

- 2) Wawancara terhadap ketua pokja inklusi dan ketua pusat sumber inklusi dalam hal ini selaku eksekutor pelaksana kebijakan di lapangan dalam hal ini kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif yang ditunjuk sebagai pelaksana dan pengelola oleh pihak dinas pendidikan kota cimahi dan telah memahami implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif hal ini dilakukan mengingat pusat sumber merupakan salah satu penunjuang dalam keterlaksanaan pendidikan inklusif di suatu daerah, keberadaan pusat sumber inklusi sendiri merupakan sekolah luar biasa yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan penetapan yang diterbitkan oleh walikota. Dimana cakupan tugas pokok dan fungsinya sudah dijelaskan dalam surat penetapan itu, sedangkan dalam tahap operasionalisasinya pusat sumber inklusi diberikan kewenangan untuk mengeksplorasi setiap kebutuhan-kebutuhan dan hambatan-hambatan yang ada di sekolah regular atau sekolah sumber dukungan yang mungkin terjadi dalam upaya penyelenggaraan pendidikan inklusif. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data tentang kondisi faktual implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di kota cimahi, langkah-langkah yang dirumuskan terkait dengan program pelaksanaan, penyuluhan, sosialisasi, faktor pendukung dan penghambat realisasi pendidikan inklusif yang akan diterapkan sebagai acuan penyusunan rumusan model implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif; serta

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

memperoleh informasi terkait penentuan kebijakan yang sebaiknya diterapkan sebagai dasar tata cara pelaksanaan program kerja yang dituangkan dalam rumusan model hipotetik implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar yang sebaiknya dilakukan serta sesuai dengan kebutuhan pelayanan penadidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

- 3) Wawancara dengan kepala sekolah di sekolah dasar pelaksana pendidikan inklusif di lapangan selaku aktor atau implementor pelaksana pendidikan inklusif yang ditunjuk oleh dinas pendidikan kota cimahi melalui surat ketetapan sebagai sekolah inklusi, Dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data tentang kondisi faktual dan obyektif mekanisme proses pelaksanaan/praktek di sekolah inklusi, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan inklusif, memberikan sumbangsih pandangan serta sikap dalam rangka penyusunan rumusan model implementasi pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar yang di konsolidasikan dengan pihak birokrasi dari dinas pendidikan sebagai upaya pemerataan kebijakan pendidikan di kota cimahi; serta memperoleh informasi terkait penentuan kebijakan yang sebaiknya diterapkan lalu dituangkan dalam rumusan model implementasi pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar yang sebaiknya dilakukan dan sesuai dengan pelayanan kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di kota cimahi.

Didalam penelitian kualitatif, pola yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dan bersifat informal, maka pertanyaan-pertanyaan tentang sikap, pandangan dan persepsi maupun faktor keyakinan dari informan tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subyek. Wawancara dilakukan terhadap personal, kepada individu (pihak birokrasi pemda, dinas pendidikan, pokja inklusi, terkait dengan pendidikan inklusif)

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

serta kepala pusat sumber dan kepala-kepala sekolah di beberapa sekolah dasar penyelenggara inklusi yang telah ditunjuk oleh dinas pendidikan melalui pokja inklusi. Dengan bertujuan untuk memperoleh data-data informasi implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di kota cimahi, sebagai langkah strategis dalam upaya pemerataan pendidikan inklusif dan sekolah inklusi di kota cimahi.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumen yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah dokumen tertulis, audio dan visual. dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis dan terekam yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai data penunjangnya, dengan tujuan untuk menambah informasi atau data dalam penelitian ini. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara dibaca, ditelaah, dikaji, serta dipelajari semua dokumen dan semua laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data dokumentasi baik dalam bentuk dokumen tertulis dan dokumen visual digunakan sebagai data pendukung, untuk melengkapi dan mempertegas secara koheren data hasil wawancara dan observasi tentang kondisi obyektif implementasi pendidikan inklusif, proses formulasi dan implementasi program yang dilakukan pelaksana, faktor-faktor pendukung dan penghambat realisasi kebijakan pendidikan inklusif, serta rumusan model implementasi pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar yang sesuai dengan pelayanan kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di kota cimahi. Peneliti memanfaatkan rakam visualisasi dan dokumen tertulis yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Dalam pengambilan data-data visualisasi dan dokumen-dokumen tertulis, maka peneliti berusaha menjaga orisinalitas dari gambar dan data tertulis yang diambil.

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen kebijakan pemerintahan daerah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif yang tertuang pada perda tentang PK-PLK, kemudian Permendiknas No 70 tahun 2009 dan dokumen-dokumen di sekolah terkait dengan upaya pemerataan pendidikan inklusif di kota cimahi. Setelah melakukan proses pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka data-data yang dihasilkan berupa gambaran implementasi kebijakan, pemaparan kondisi obyektif pokja inklusi, aspek-aspek pelaksanaan pendidikan inklusif, serta rumusan desain model implementasi pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar di kota cimahi yang sesuai kebutuhan. Dan yang sebaiknya dilakukan di kota cimahi. Sumber data pada teknik dokumentasi ini dibagi menjadi dua bagian, diantaranya adalah sumber data primer seperti implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam pelaksanaan dan pengelolaan di pokja inklusi pun di sekolah yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Sumber data sekunder yaitu respon dan informan.

Peneliti menggunakan manusia sebagai instrumen utama, yaitu peneliti sendiri, karena dalam penelitian kualitatif manusia dipandang lebih cermat dan teliti, manusia sebagai alat perseptual peka dan dapat bereaksi pada stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bermakna bagi peneliti, menurut Nasution (2000: 56) manusia sebagai alat instrumen dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data dalam sekaligus.

4. Studi Kepustakaan atau Litelatur

Studi kepustakaan atau studi litelatur digunakan sebagai penunjang pada penelitian ini. Studi kepustakaan atau studi litelatur yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian dengan cara mempelajari atau membaca beberapa atau berbagai macam sumber literatur,

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

baik itu buku, artikel, jurnal, dokumen tertulis serta sumber-sumber lainnya yang relevan yang berhubungan dengan maksud dan masalah-masalah yang di angkat dan sedang penulis teliti pada penelitian ini yaitu antara lain kebijakan pendidikan, manajemen pendidikan, indeks inklusi dan implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif. Adapun tujuan dari penggunaan studi kepustakaan atau studi litelatur dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan beberapa konsep dan beberapa landasan teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh keterkaitan antara teori dan tujuan penelitian serta dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran juga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terstruktur, studi dokumentasi dan studi kepustakaan atau literatur .

F. Pengembangan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memiliki arti sebagai sarana penelitian (berupa seperangkat tes tertulis, pedoman observasi, pedoman wawancara tidak terstruktur, format penilaian) untuk mengumpulkan data-data empirik yang sudah dikumpulkan pada teknik pengumpulan data serta sebagai bahan untuk pengolahan data. Selain itu, Menurut Sugiyono (2010: 222) peneliti kualitatif sebagai *key/human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif peneliti disini sebagai kunci instrumen karena dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi segalanya dari seluruh proses penelitian. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 223) bahwa peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitaitaif. Dari pernyataan sugiyono tersebut, maka keberadaan peneliti dapat dikatakan pula sebagai instrumen alat pengumpul data yang utama. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen pokok

ROBIANSYAH. STU, 2017
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

yang dapat mengadakan pencarian terhadap fenomena atau objek yang belum jelas dan belum pasti yang terjadi di lapangan. Selain itu, hanya peneliti yang dapat menyesuaikan dan berhubungan dengan responden dan subyek lainnya serta dapat memahami kaitan-kaitan dengan kenyataan dilapangan, dan mampu menilai apakah kehadiran peneliti dapat menjadi faktor pengganggu sehingga apabila itu terjadi hal-hal demikian, peneliti bisa menyadarinya sekaligus berusaha mengatasinya. Maka, yang menjadi instrumen kunci dan alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Akan tetapi varian instrumen yang sudah disebutkan diatas seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan format penilaian memungkinkan menjadi bagian dari intrumen penelitian yang akan menjadi alat pengumpul data dalam penelitian ini.

Instrumen dalam penelitian ini mencakup hal-hal yang muncul dalam pertanyaan penelitian yaitu : (1) Kondisi faktual Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Kota Cimahi, berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif; (2) Faktor pendukung dan penghambat dari realisasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi yang berkaitan dengan Mekanisme/Proses pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi; (3) Model implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi yang sesuai dengan kebutuhan dan sebaiknya dilakukan.

Penjelasan mengenai instrumen penelitian yang sudah dipetakan menjadi kisi-kisi pedoman instrumen penelitian dan dibuat kedalam tabel dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3.1.
Kisi-Kisi Pedoman Instrumen Penelitian

Pertanyaan penelitian	Aspek/Ruang lingkup yang diamati	Indikator	Teknik Pengumpulan data	Instrumen Pengumpulan data	Informan
1	2	3	4	5	6
Kondisi faktual Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Kota Cimahi, berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerataan pendidikan dan program pendidikan sebagai upaya pencapaian visi dan misi pendidikan 2. Implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif, tentang pemerataan pendidikan inklusif yang dilakukan oleh pihak pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak pemerintah daerah mampu menjelaskan kebijaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Cimahi. 2. Pemerintah daerah mampu menjelaskan kebijakan pemerataan pendidikan di Kota Cimahi. 3. Pemerintah daerah mampu menjelaskan visi dan misi pencapain pendidikan di Kota Cimahi. 4. Pemerintah daerah mampu menjelaskan perkembangan aspek pendidikan di Kota Cimahi. 5. Pemerintah daerah mampu menjelaskan program pendidikan yang mendukung perkembangan pendidikan inklusif di Kota Cimahi, ditinjau dari aspek : <ol style="list-style-type: none"> a. Gambaran desain perencanaan implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif ditinjau dari Permendiknas No. 70 Thn. 2009 (seperti; renstra/roadmap, pola implementasi, rencana aksi, dan petunjuk teknis. b. Gambaran mekanisme dan teknis implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif (tindakan pemerintah dalam proses implementasi 	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	Pedoman Observasi Pedoman Wawancara Pedoman dokumentasi	Pemerintah Kota Cimahi (Kepala Dinas Pendidikan, Kasubag Pendidikan Dasar, Ketua Pokja Inklusi)

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

		dalam mewujudkan pemerataan sekolah inklusif di Kota Cimahi).			
Pertanyaan penelitian	Aspek/Ruang lingkup yang diamati	Indikator	Teknik Pengumpulan data	Instrumen Pengumpulan data	Informan
1	2	3	4	5	6
Mekanisme/Proses pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Tentang Konsep Pendidikan Inklusif 2. Kebijakan Tentang Implementasi Pendidikan Inklusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan konsep pendidikan inklusif, mampu menjelaskan konsep keberagaman anak dan mampu menjelaskan usaha dalam memperoleh pemahaman pendidikan inklusif. 2. Mampu menjelaskan Permendiknas RI No. 70. Thn. 2009 tentang pendidikan inklusif, yaitu pasal 1-4 yang berkaitan dengan pemerataan sekolah inklusif dan sistem pelaksanaan pendidikan inklusif. 3. Menjelaskan proses asesmen yang dilakukan terkait pelayanan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. 4. Menjelaskan kebijakan dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. 5. menjelaskan kebijakan dalam perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan. 6. Mampu menjelaskan kebijakan tentang penyesuaian kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus. 7. Menjelaskan Proses pengembangan program kerja dan layanan untuk sekolah inklusi dalam renstra (seperti spesifikasi program dan kegiatan). 8. Menjelaskan Proses keterukuran program kerja dan kegiatan yang direncanakan pada sekolah inklusi. 9. Menjelaskan Faktor-faktor apa saja yang 	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	Pedoman Observasi Pedoman Wawancara Pedoman dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Sumber 2. Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

		penting dalam kesuksesan tujuan dan sasaran pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi.			
1	2	3	4	5	
Faktor pendukung dan penghambat realisasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor pendukung implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi 2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan komunikasi dan sosialisasi pemerintah daerah kepada para aktor pelaksana di lapangan terkait model implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi 2. Menjelaskan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di kota cimahi. 3. Menjelaskan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di kota cimahi. 4. Menjelaskan struktur dan lingkungan birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. 5. Menjelaskan dukungan masyarakat dalam implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi 6. Upaya-upaya teknis yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Cimahi. 7. Mampu menjelaskan proses evaluasi dan metode evaluasi sebagai proses kontrol terhadap keberhasilan pelaksanaan Pendidikan inklusif 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subag Pendidikan Dasar 2. Ketua Pokja Inklusi 3. Ketua Pusat Sumber 4. Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif
Pertanyaan penelitian	Aspek/Ruang lingkup yang diamati	Indikator	Teknik Pengumpulan data	Instrumen Pengumpulan data	

1	2	3	4	5	
Desain model implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan dan sebaiknya dilakukan di Kota Cimahi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiprah Pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait pelayanan pendidikan inklusif. 2. Desain Model Implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan dan sebaiknya dilakukan di Kota Cimahi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan kiprah pemerintah daerah, kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan/keputusan terkait pelaksanaan dan pemerataan pendidikan inklusif di Kota Cimahi. 2. Mampu menyusun desain model implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang ideal dan sesuai kebutuhan layanan pendidikan sebagai upaya pemerataan sekolah inklusi di Kota Cimahi. 	Wawancara, Dokumentasi	Pedoman Wawancara Pedoman dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Studi Literatur Peneliti

G. Teknik Keabsahan Data

Semua bentuk penelitian memerlukan keabsahan data yang dapat dibuktikan dengan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif untuk mengukur keabsahan data tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985: 289) berikut ini: “Validitas internal yang dinyatakan dalam kredibilitas (*credibility*), validitas eksternal yang dinyatakan dalam *transferability*. Reliabilitas dinyatakan dalam *dependability* dan objektivitas yang dinyatakan dalam *confirmability*”

1. *Credibility*

Credibility (kepercayaan) adalah mengusahakan agar hasil-hasil penelitian dapat dicapai kebenarannya oleh peneliti untuk kenyataan ganda yang sedang diteliti atau kepercayaan penemuan yang dapat dicapai atau dengan kata lain kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep responden. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara memperpanjang waktu penelitian sehingga penemuannya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk keabsahan data diperlukan keikutsertaan Peneliti dalam penelitian. Dengan demikian, peneliti akan dapat mempelajari fenomena dan kejadian dari penelitian itu sendiri secara terperinci dan dijamin kebenarannya.

2. *Persistence Observation*

Melakukan observasi/pengamatan secara terus menerus dan sungguh-sungguh terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan isu menyoal implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak dari berkebutuhan khusus, Proses Ketelitian atau ketekunan dalam pengamatan akan menghasilkan kedalaman data yang diinginkan sehingga data yang dibutuhkan lebih akurat. Demikian pula dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati

3. *Triangulation*

Triangulation (triangulasi) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, yaitu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari berbagai sumber data dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan sumber data tersebut.

a. Triangulasi Teknik : Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan berbagai teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

b. Triangulasi Waktu : Waktu seringkali mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya

4. *Peer Debriefing*

Peer Debriefing dimaksud adalah untuk menjelaskan hasil sementara dari hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk proses diskusi analitik yang dilakukan dengan rekan-rekan sejawat. Untuk memberikan masukan, kritik atau tanggapan terhadap hasil penelitian (*peer debriefing*). Teknik yang juga

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

sering disebut dengan *peer examination* ini akan dilakukan sejak proses awal penelitian sampai penyusunan laporannya untuk menyempurnakan keterbatasan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis hasil penelitian

5. *Member Check*

Member Check adalah pengecekan sumber utama dalam proses pengumpulan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian sebagai serangkaian alat pengumpulan data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh responden. Pada penelitian ini proses melakukan pemeriksaan ulang setiap kali selesai melakukan wawancara untuk meyakinkan bahwa informasi yang diperoleh peneliti mengenai segala masalah berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya telah sesuai dengan yang dimaksud informan/responden.

6. *Reference Used*

Dalam mengupayakan referensi yang cukup untuk meningkatkan keabsahan informasi yang diperlukan dengan memperbanyak dukungan bahan referensi seperti buku, media cetak maupun elektronik, journal, makalah, artikel yang berkaitan dengan implemtasi kebijakan pendidikan inklusif dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

7. *Confirmability*

Pengujian komfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji komfarmibility berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan. Untuk dapat melakukan pemeriksaan ini, peneliti mempersiapkan bahan-bahan berikut: (1) data mentah, berupa catatan lapangan, (2) hasil analisis data berupa rangkuman, (3) catatan mengenai proses penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan usaha untuk dapat memilah, menyortir, menggolongkan serta menyusun data kedalam kategorisasi, tujuannya adalah mengklasifikasi data untuk menjawab pertanyaan pokok. Menurut Sugiyono (2010: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Pengolahan data atau analisis data yang dilakukan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang dikumpulkan, dan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, baik itu data skunder maupun data primer. Untuk selanjutnya dari catatan lapangan tersebut dilakukan pengolahan data dengan cara dibaca, ditelaah dan dipelajari untuk membuat atau memberi koding. Setelah itu dilakukan analisis dengan membandingkan apa yang ditemukan dari data-data di lapangan dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan profesional dan berdasarkan studi literatur dari sumber-sumber yang terkait dengan kegiatan penelitian ini. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawin/verification*. Berdasarkan uraian pendapat ahli itu, teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian merupakan proses yang koheren yaitu pada saat pengambilan data, dimana data sudah diolah dan dimaknai, triangulasi untuk menjaga orisinitas informasi, proses pemaknaan yang dilakukan dengan berpijak pada dasar teori yang bersumber dari referensi, yang relevan. Maka dilakukan rumusan kesimpulan dan diajukannya diseminasi model implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar di Kota Cimahi Berdasarkan data yang diperoleh, dikembangkan penajaman/penjelasan melalui

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian yang dilakukan ini, data tidak dianggap sebagai *error reality* yang dipersalahkan oleh keberadaan teori sebelumnya, tetapi dianggap sebagai *another reality* dalam rujukan (S.A.Sehlegel, 1984: 12). Dalam hal ini peneliti mencari data dengan apa adanya, tanpa tekanan dan intervensi halus dari teori atau paradigma yang dimiliki peneliti selama ini. Namun demikian peneliti tetap berusaha mencari makna dari perlakuan dan perbuatan yang nampak, hal ini dilakukan dalam rangka memahami stimulus, gejala dan kelakuan tersebut dalam konteks yang lebih komprehensif, dipandang dari kerangka pikiran dan sense dari si pelaku/aktor. Berdasarkan hal itu, dalam (Nasution, 2003: 9) mengasumsikan bahwa data yang didapatkan merupakan data langsung dari orang pertama, tanpa melalui tes atau angket yang pada pemaparan hal tersebut menciptakan jarak dengan sumber data maka berbagai langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yang digunakan, dibedah dan diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi pemfokusan dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dengan kata lain, reduksi data ini yaitu suatu bentuk analisis data dengan cara membuang yang tidak perlu dari isi data, merinci, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, yang kemudian disusun atau dilakukan kodifikasi dengan menggunakan analisis konten dan diorganisasi dengan cara sedemikian rupa dengan menggunakan analisis domain berdasarkan kategori-kategori yang ditemukan sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Setelah itu kemudian dilakukan analisis komparatif dengan melakukan pengecekan silang antara keempat data yang setiap sumber datanya disilangkan atau di *crosscheck* dengan sumber data lainnya sehingga validitas data yang ada dapat dipertanggung jawabkan karena data akhir yang didapat merupakan hasil dari perbandingan berbagai sumber data yang ada. Langkah sederhananya dilakukang dengan jalan melakukan abstraksi yang merupakan usaha dalam membuat rangkuman inti yang berkaitan dengan kondisi obyektif atau faktual prihal implementasi kebijakan pendidikan

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

inklusif, memaparkan tahap-tahap manajemen strategi yang dilakukan pokja inklusi, dan menyusun rumusan model implementasi pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk naratif, maka penyajian data merupakan sekumpulan data atau informasi tersusun dari berbagai sumber, baik itu dari data primer maupun data sekunder yang terbukti telah diuji dan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan dilapangan (selama penelitian) yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Sehingga data yang didapat mudah untuk dibaca dan dipahami. Dan selanjutnya akan dianalisis gambaran obyektif implementasi kebijakan pendidikan inklusif, memaparkan tahap-tahap manajemen strategi dari pokja inklusi, serta realisasi penyusunan rumusan model implementasi pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar.

3. Penyimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawin/verification*)

Penyimpulan adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat dan/atau formula yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian luas. Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan diakhir dimana sebelum menarik kesimpulan dan verifikasi, peneliti sejak awal pengumpulan data mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Dari pengumpulan data tersebut didapat kesimpulan-kesimpulan awal yang masih bersifat sementara yang kemudian menjadi lebih rinci dan menjadi kuat dengan adanya dukungan data-data atau bukti-bukti yang valid, jelas dan kuat yang mendukung dari data tersebut. Setelah itu, kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni sebagai validitas dari data itu sendiri, sehingga dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel. Dari penjelasan tersebut maka dapat diasumsikan bahwa langkah terakhir adalah

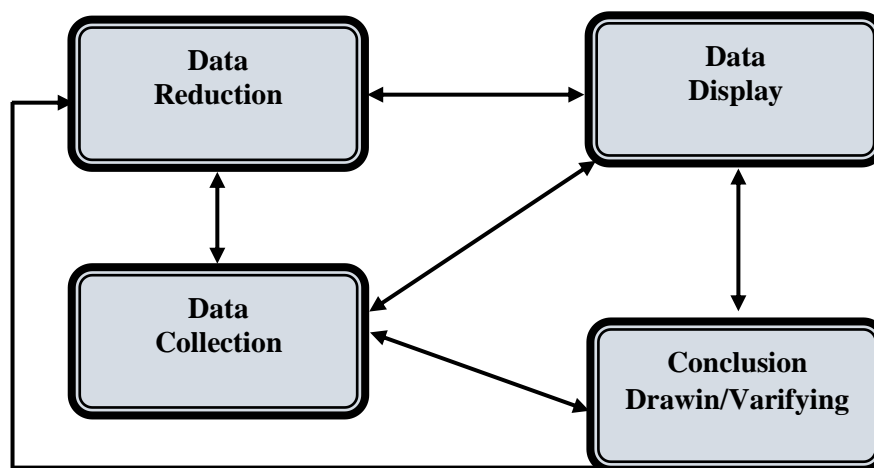
ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

mengadakan verifikasi keabsahan data untuk selanjutnya dapat menjadikan hasil analisis data sebagai acuan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, untuk itu temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar atau semu sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Adapun skematik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini divisualisasikan dalam gambar di bawah ini :



Gambar.3.2. Tahapan-Tahapan Analisis Data Kualitatif
(Sumber : Miles and Huberman 2007:15-21)

I. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan bersumber pada prosedur penelitian kualitatif, menurut ahli yaitu Maleong (2005) mengemukakan ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) Pra lapangan, (2) Kegiatan lapangan, dan (3) Analisis intensif. Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan dilapangan, meliputi pra survey sampai dengan tahap pengujian data hasil penelitian.

1. Pra Survey/Orientasi

Tahapan ini dilakukan peneliti melalui observasi kegiatan yang terkait dengan kondisi di lapangan dan melakukan dialog dengan pimpinan dinas pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan

pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi, kemudian dilanjutkan dengan observasi dan kembali melakukan dialog dengan informan/responden lain diantaranya ketua pokja inklusi, ketua pusat sumber dan kepala sekolah yang dipandang perlu dan dapat memberikan penambahan data informasi guna memberikan pemahaman akan masalah yang menjadi fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para pemangku kebijakan yang dapat memberikan pendalaman akan masalah yang menjadi fokus penelitian. Pada tahap ini materi wawancara masih bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung. Kemudian data hasil wawancara dibandingkan dengan studi dokumentasi dan observasi.

3. Diskusi

Guna memperjelas ide dan gagasan yang dikemukakan para informan/responden yang diwawancarai, peneliti juga melakukan diskursus secara berkesinambungan dengan informan/responden yang berada di institusi pemerintahan dan sekolah inklusi. Diskusi ini bersifat menyeluruh dan berlanjut selama peneliti terjun langsung ke lapangan dan selama melakukan penulisan. Hal ini dilakukan juga untuk triangulasi data.

4. Triangulasi

Triangulasi dilakukan melalui tahapan wawancara, observasi langsung dan tertutup. Observasi tidak langsung/tertutup dilakukan dengan cara pengamatan atas beberapa kejadian dan aktivitas yang muncul, kemudian dari hasil pengamatan itu dapat ditarik kesesuaian yang menghubungkan antar berbagai fenomena kejadian.

5. Observasi Langsung/Eksplorasi

Observasi dilakukan pertama kali terhadap seluruh aktivitas pengawasan yang dilakukan birokrasi di dinas pendidikan dan sekolah inklusi, kemudian serangkaian observasi yang bersifat keseluruhan ini diperoleh data-data yang bersifat umum, maka peneliti akan lebih memfokuskan observasi pada

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAH

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

kegiatan-kegiatan yang langsung terkait dengan fokus dalam penelitian ini. Kemudian data hasil observasi dibandingkan dengan studi dokumentasi, sebagai upaya melihat konsistensi serta keterikatan informasi yang diperoleh. Sehingga data-data itu layak dan benar-benar menunjukkan fenomena yang sebenarnya.

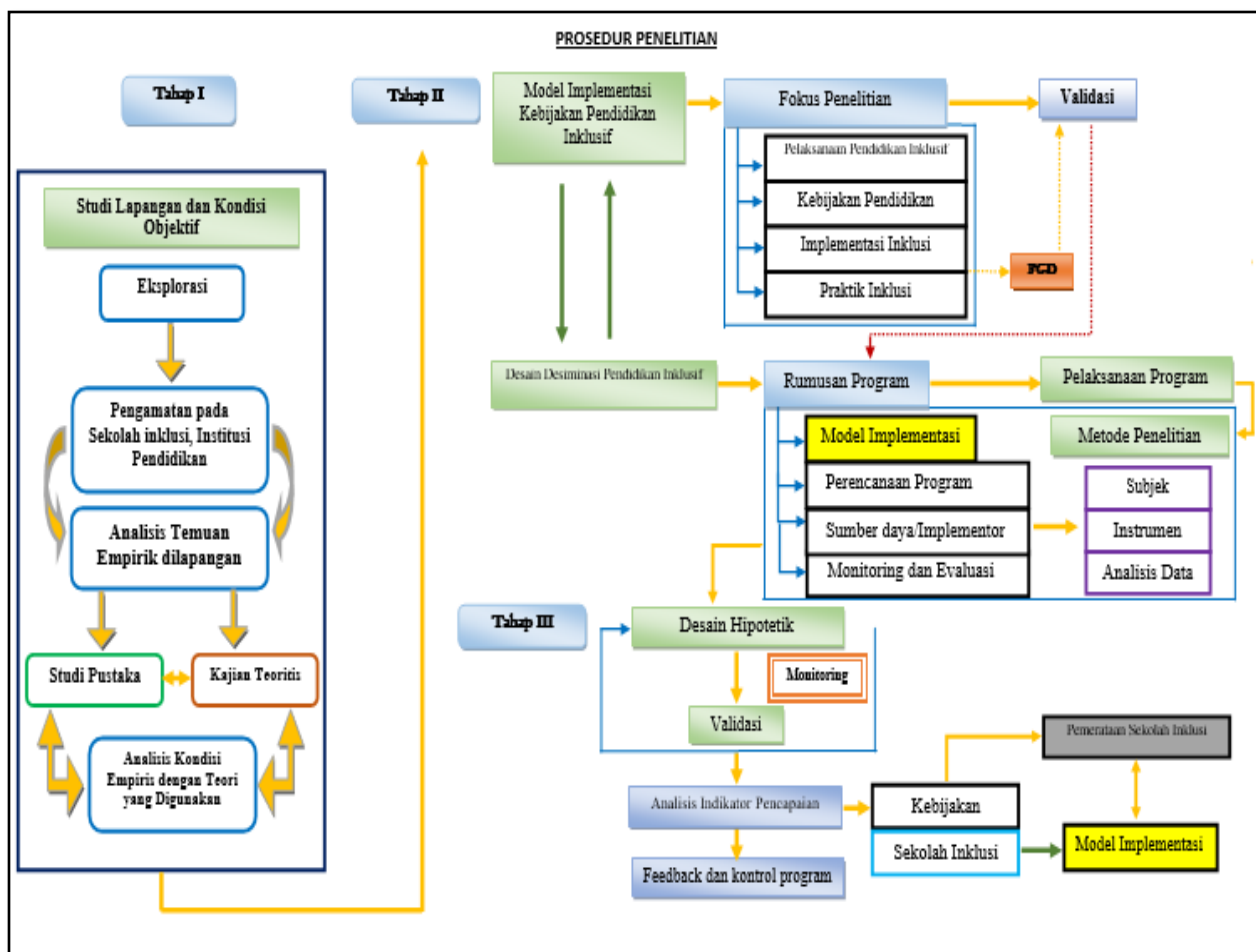
6. Studi Dokumentasi

Tahapan studi dokumentasi bermaksud untuk mempertegas konsisi yang terjasi, serta digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mempertajam analisis terhadap hasil wawancara dan observasi.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan simultan terhadap seluruh pendapat dari informan/responden terkumpul yang berdasarkan penulisan kembali dari alat rekam maupun dari alat tulis. Peneliti mengkategorisasi dan mengklarifikasi data serta dilakukan tahap demi tahap, seiring dengan munculnya dan berkembangnya persoalan baru. Sangat memungkinkan subyek penelitian tidak mendapatkan materi wawancara yang sama, hal ini berkaitan dengan pendalaman obyek materi dari peneliti itu sendiri.

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dilapangan, secara kronologis digambarkan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini:



Gambar 3.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian tersebut diuraikan kedalam penjelasan sebagai berikut:

1. Tahap I dalam penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan untuk menggambarkan profil dari kondisi obyektif dari implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar berdasarkan analisis ditinjau melalui indeks inklusi, dengan cara mengeksplorasi terhadap subyek yaitu kepala bagian pendidikan dasar, kepala pusat sumber, kepala sekolah,, guru

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

pendamping khusus serta orangtua. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman observasi dengan teknik observasi tertutup dengan mengamati aktivitas-aktivitas yang ada guna mendapatkan data-data empirik temuan dilapangan. Setelah mendapatkan data-data empirik, kemudian menganalisis dan mendeskripsikan data-data tersebut menggunakan studi pustaka dan kajian teoritis agar menemukan kesamaan prosedur pendidikan inklusi antara kondisi empirik dengan teori yang digunakan. dalam model implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Cimahi pada jenjang sekolah dasar yang ditinjau dari indeks inklusi sebagai fokus penelitian. Instrumen yang digunakan sama dengan tahapan proses eksplorasi yaitu pedoman wawancara, data-data empirik yang dihasilkan melalui teknik wawancara terbuka (*open-ended*) berdasarkan kisi-kisi wawancara yang telah divalidasi sehingga menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan detail kepada informan, dalam wawancara terbuka ini dapat terjadi proses *probing*.

2. Tahap II dalam penelitian ini yaitu menyusun rumusan awal model implementasi pendidikan inklusif sebagai fokus dalam penelitian ini dimana produknya berupa draft naskah akademik yang meliputi proses kebijakan pendidikan inklusif, pemahaman tentang pendidikan inklusif, mekanisme atau proses pelaksanaan pendidikan inklusif, kebijakan pendidikan yang diberlakukan di sekolah, praktik pada proses pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif meliputi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi), serta faktor pendukung dan penghambat realisasi dari pendidikan inklusif. Untuk menentukan keabsahan draft rumusan model implementasi tersebut maka harus dilakukan uji material terhadap rumusan itu dengan tatacara melakukan FGD (*focus grup discussion*) atau Diskusi Kelompok Terarah merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Tujuan dari Diskusi Kelompok Terarah itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Penyelesaian masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah informasi berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Karakteristik Diskusi Kelompok Terarah adalah jumlah peserta diskusi terbatas, dengan tujuan agar setiap peserta mendapat kesempatan untuk berbicara,

ROBIANSYAH. STU, 2017

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KOTA CIMAHI

universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

mengemukakan pendapat dan terlibat aktif dalam diskusi, Peserta diskusi berasal dari satu populasi sasaran yang sama atau kelompok homogen, dengan ciri-ciri yang sama, ditentukan dari tujuan penelitian. Unsur yang terlibat dalam diskusi kelompok terarah ini ditentukan oleh peneliti yang meliputi kepala bagian pendidikan dasar, ketua pokja inklusi, ahli pendidikan inklusif, kepala sekolah, ketua pusat sumber. Hasil yang didapatkan dan terhimpun kemudian dikembangkan untuk di validasi lagi dengan cara *expert judgement* terhadap model hipotetik implementasi pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar oleh ahli yang kapabel dalam pendidikan inklusif, langkah tersebut bertujuan memberikan *legal standing* terhadap naskah ilmiah/penelitian yang dapat digunakan dan diterapkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilakukan oleh sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Cimahi dalam upaya mewujudkan pemerataan sekolah inklusi di kota cimahi.

3. Tahap III dalam penelitian ini mengetahui kiprah pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam mendorong implementasi pendidikan inklusif melalui kebijakan yang akan diberlakukan. Dalam hal ini adalah kebijakan yang dihasilkan berdasarkan hasil *expert judgement* tentang model hipotetik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, hal tersebut dilakukan guna mengukur kemajuan pelaksanaan program pemerataan sekolah inklusi dalam implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif yang dilakukan sekolah dasar sumber dukungan sebagai sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sehingga dapat memberikan kebutuhan layanan pendidikan yang ideal bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi berdasarkan indeks inklusi. Serta memberikan sumbangsih gambaran reorientasi pengelolaan pendidikan inklusif sehingga dapat menjadi kesatuan sinergis dalam sistem pendidikan yang diberlakukan dan dilaksanakan di Kota Cimahi.